# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi keuangan yang disajikan bagi pengguna informasi keuangan daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Penyusunan laporan keuangan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan keuangan berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Laporan Keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan dibuat untuk dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas akuntansi, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.
Laporan Keuangan bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dan politik.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan 2023 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

1. Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negera Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2018;
30. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 16 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas;
31. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 78).
32. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2022; (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 59).

**1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

*Bab I Pendahuluan*

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

*Bab II Tugas Pokok, Fungsi dan Indikator Kinerja*

2.1. Tugas Pokok

2.2. Fungsi

2.3. Indikator Kinerja

*Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan*

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

*Bab IV Kebijakan Akuntansi*

4.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.2. Basis pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

*Bab V Penjelasan atas Laporan Keuangan*

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Penjelasan Neraca

5.3. Penjelasan Laporan Operasional

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

*Bab VI Penjelasan atas informasi non keuangan*

*Bab VII Penutup*

# BAB II

# TUGAS POKOK, FUNGSI DAN INDIKATOR KINERJA

## 2.1 Tugas Pokok

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, meliputi Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan dan Sungai, Komunikasi serta Informatika.

## 2.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pembinaan umum meliputi kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, tata laksana, pelayanan publik, pengawasan, dan akuntabilitas aparatur;
2. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
3. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Kapuas;
4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Transportasi;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
6. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas membentuk susunan organisasi sebagai berikut :

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh :

1. Sekretariat;
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
3. Bidang Prasarana dan Keselamatan

## 2.3 Indikator Kinerja

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE | | | | | CAPAIAN AKHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* |
| | pelayanan angkutan yang murah, mudah, aman, lancar dan terjangkau | Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu dan terjangkau untuk melayani pergerakan orang dan barang. | Ratio Ijin Trayek | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 70 |
| | | | Jumlah Fasilitas keselamatan lalu lintas | Buah | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 249 |
| | | | Jumlah Dermaga/Pelabuhan/Terminal yang berfungsi dengan baik | Buah | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| | | | Jumlah Uji Kir Sarana Angkutan | Unit | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 2493 |
| | | Terwujudnya dan terbangunnya sarana dan prasarana serta fasilitas transportasi guna mendukukung perwujudan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, dan keterjangkauan dalam pelayanan, sejalan dengan perwujudan rencana struktur ruang wilayah khususnya perwujudan sistem jaringan transportasi wilayah. | Jumlah jaringan sarana sarana angkutan umum | Jaringan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 |
| | Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan | Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah | Presentasi Desa dan Kelurahan yang terhubung dengan moda transportasi | Persen | 46,75 | 45 | 49 | 50 | 52 | 35 |
| | | | Presentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas | Persen | 46 | 42 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| | | | Rasio elektrifikasi | Persen | N/A | N/A | 55 | 60 | 65 | 70 |

# BAB III
# IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pada bagian ini akan disajikan analisa capaian kinerja keuangan yang digambarkan dalam ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas secara keseluruhan sebagai akuntabilitas keuangan terhadap capaian indikator dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

Dari gambaran realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dijelaskan sebagai berikut.

## 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas menganggarkan pendapatan sebesar Rp. 1.192.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 768.253.000,- atau teralisasi sebesar 64,45%.

Belanja terealisasi sebesar Rp. 18.853.888.496,- dari anggaran sebesar Rp. 23.576.081.000,- atau terealisasi sebesar 79,97%. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp. 6.124.722.200,- atau 89,24% dari anggaran belanja modal sebesar Rp. 6.863.324.400,- dan Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp. 12.729.166.296,- atau 76,16% dari anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 16.712.756.600,-

## 3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

Pada sub bab ini akan diuraikan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2023 dalam kaitannya pencapaian terhadap target pendapatan maupun penyerapan pagu anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan indikator kinerja yang diharapkan. Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas dari target pendapatan yang telah ditetapkan dapat terealisasi sebesar Rp. 768.253.000,- atau 64,45%. terjadi Penurunan prosentase dari tahun 2022 yang mencapai 80,13%
2. Untuk penyerapan pagu anggaran belanja cukup terserap sebesar Rp. 18.853.888.496,- atau 79,97%
3. dari indikator kinerja yang telah ditentukan ijin trayek darat 0 % dan sungai 74,28% jumlah fasilitas keselamatan lalu lintas 251 buah, jumlah dermaga/ pelabuhan/terminal yang berfungsi dengan baik 12 buah, jumlah uji KIR sarana angkutan 35 %, jumlah jaringan sarana angkutan umum 21 jaringan, presentasi desa dan kelurahan yang terhubung moda transportasi 76,93%.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 19 Tahun 2021, aplikasi FMIS Keuangan sebagai aplikasi yang digunakan untuk penatausahaandan pelaporan, Laporan Realisasi Anggaran yang bersumber pagu anggaran APBD murni dan atau pagu tambahan akan terlihat pada DPPA-SOPD khusus belanja/kegiatan yang bersangkutan, dimana akan terlihat anggaran sebelum pergeseran anggaran setelah pergeseran serta beberapa tambahan atau berkurang.

Berikut diuraikan revisi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilakukan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

| No | Kode Rek. | Rincian Obyek Belanja | Pagu Anggaran Sebelujm Perubahan (Rp) | Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Selisih (Rp) Bertambah/Berkrang |
|---|---|---|---|---|---|
| | **5** | **Belanja Daerah** | **20.636.022.000** | **23.576.081.000** | **2.940.079.000** |
| **1** | **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **13.089.969.600** | **16.712.756.600** | **3.622.787.000** |
| | 5.1.01 | Belanja Pegawai | 4.408.242.000 | 6.373.511.000 | 1.965.269.000 |
| | 5.1.02 | Belanja Barang dan jasa | 8.681.727.600 | 10.339.245.600 | 1.657.518.000 |
| **2** | **5.2** | **BELANJA MODAL** | **7.546.032.400** | **6.863.324.400** | **(682.708.000)** |
| | 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 280.142.400 | 982.434.400 | 702.292.000 |
| | 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 5.250.000.000 | 2.600.000.000 | (2.650.000.000) |
| | 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi | 2.015.890.000 | 3.280.890.000 | 1.265.000.000 |
| | | | | | |

# BAB IV
# KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SOPD sebagai entitas akuntansi adalah.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

## 4.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walau pun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat padasaat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

b. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Kapuas terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

e. anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal daripinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk

f. pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

**Neraca**

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Kapuas.

c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kapuas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban dalam satu periode.

**Aset**

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kapuas, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Kapuas atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kapuas dan investasi permanen lainnya.

Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

**Kewajiban**

Kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Kabupaten Kapuas lain atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kapuas juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Kapuas atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

**Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kapuas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Kapuas pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

**Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dan tidak perlu dibayar kembali;

b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.;

c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil; dan

d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

**Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Akuntansi;

b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan;

c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yangwajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

## 4.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dariimbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

# BAB V
# PENJELASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## 5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### 5.1.1 Pendapatan

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah. Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 768.253.000,- dan Rp. 821.373.100,-

#### 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 768.253.000,- dan Rp. 821.373.100,-

#### 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 768.253.000,- dan Rp. 821.373.100- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | % | Realisasi 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Jasa Umum | 790.000.000 | 622.572.500 | 78,81 | 655.767.500 |
| 2 | Retribusi Jasa Usaha | 402.000.000 | 140.501.400 | 34,95 | 165.605.600 |
| | **Jumlah** | **1.192.000.000** | **763.073.900** | **64,02** | **821.373.100** |

#### Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan. Realisasi Retribusi Jasa Umum untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 622.572.500,- dan Rp. 655.767.500,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | % | Realisasi 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 550.000.000 | 535.310.000 | 97,33 | 552.622.500 |
| 2 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Retribusi PKB - Mobil – Penumpang – Sedan dan Retribusi PKB – Mobil Barang/Beban – Pick up) | 240.000.000 | 87.262.500 | 36,36 | 103.145.000 |
| | **Jumlah** | **790.000.000** | **622.572.500** | **78,81** | **655.767.500** |

**Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah atau kekayaan daerah. Realisasi Retribusi Jasa Usaha untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 140.501.400,- dan Rp. Rp. 165.605.600,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | % | Realisasi 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Kendaraan Bermotor | 42.000.000 | 49.531.000 | 117,94 | 32.690.000 |
| 2 | Retribusi Pelayanan Kepelabuhan | 300.000.000 | 36.370.400 | 12,13 | 73.415.600 |
| 3 | Retribusi Penyeberangan di Atas Air | 60.000.000 | 54.600.000 | 91 | 59.500.000 |
| | **Jumlah** | 402.000.000 | **165.605.600** | **41,20** | **165.605.600** |

**5.1.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 5.179.100,- dan Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Anggaran 2021 (Rp) | Realisasi 2021 (Rp) | % | Realisasi 2020 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Penjualan Aset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### 5.1.2 Belanja

Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 18.853.888.496,- dan Rp. 10.505.307.623,-

### 5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 12.729.166.296,- dan Rp. 9.617.493.623,-

### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 3.801.624.373,- dan Rp. 4.091.104.500,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | % | Realisasi 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 4.360.881.000 | 2.857.378.644 | 65,52 | 2.923.128.328 |
| 2 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 1.896.000.000 | 870.486.004 | 45,91 | 1.102.694.071 |
| 3 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 105.902.000 | 67.283.490 | 63,53 | 54.749.825 |
| 4 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 10.728.000 | 6.476.235 | 60,37 | 10.532.276 |
| | **Jumlah** | **6.373.511.000** | **3.801.624.373** | **59,65** | **4.091.104.500** |

### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 8.927.541.923,- dan Rp. 5.526.389.123,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | % | Realisasi 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Barang Pakai Habis | 1.203.871.600 | 1.140.037.400 | 94,70 | 709.905.800 |
| 2 | Belanja Jasa Kantor | 4.392.339.000 | 3.773.279.931 | 85,91 | 3.101.135.015 |
| 3 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 0 | 0 | | 0 |
| 4 | Belanja Pemeliharaan | 2.993.610.000 | 2.311.287.448 | 77,21 | 493.835.770 |
| 5 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.749.425.000 | 1.702.937.144 | 97,34 | 1.221.512.538 |
| 6 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 0 | 0 | | 0 |
| 7 | Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga - Hibah | 0 | 0 | | 0 |
| 8 | Belanja Honorarium PNS | 0 | 0 | | 0 |
| 9 | Belanja Honorarium Non PNS | 0 | 0 | | 0 |
| 110 | Belanja Barang Non Kapitalisasi | 0 | 0 | | 0 |
| | **Jumlah** | **10.339.245.600** | **8.927.541.923** | **86,35** | **5.526.389.123** |

### 5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja atas pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 6.124.722.200,- dan Rp. 887.814.000,-

### 5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan 0,00

### 5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 973.360.000,- dan 346.560.000,-

| No | Uraian | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | % | Realisasi 2022(Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Bengkel dan Alat Ukur | 0 | 0 | 0 | 266.980.000 |
| 2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Kantor dan Rumah Tangga | 230.292.000 | 227.910.000 | 98,97 | 54.650.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Belanja Modal Komputer | 237.142.400 | 233.850.000 | 98,61 | 24.930.000 |
| 5 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Belanja Modal Rambu-Rambu | 200.000.000 | 199.300.000 | 99,65 | 0 |
| | **Jumlah** | **982.434.400** | **973.360.000** | **99,08** | **346.560.000** |

### 5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 1.877.536.000,- dan Rp. 0,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | % | Realisasi 2022(Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung | 2.600.000.000 | 1.877.536.000 | 72,21 | 0 |
| | **Jumlah** | 2.600.000.000 | 1.877.536.000 | 72,21 | 0 |

### 5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 3.273.826.200,- dan Rp. 505.734.000,-

| No | Uraian | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | % | Realisasi 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Belanja Modal Jaringan Listrik | 0 | 0 | 0 | 497.084.000 |
| 2 | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya | 0 | 0 | 0 | 8.650.000 |
| 3. | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Belanja Modal Jaringan | 3.280.890.000 | 3.273.826.000 | 99,78 | 0 |
| | **Jumlah** | 3.280.890.000 | 3.273.826.000 | 99,78 | **505.734.000** |

### 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 35.520.000,-

| No | Uraian | Anggaran 2023 (Rp) | Realisasi 2023 (Rp) | % | Realisasi 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro | 0 | 0 | 0 | 35.520.000 |
| | **Jumlah** | **0** | **0** | **0** | **35.520.000** |

## 5.2 PENJELASAN NERACA

### 5.2.1 Aset

Aset terdiri dari aset lancar, aset tetap, aset lainnya. Jumlah aset per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 111.988.565.346,- dan Rp. 85.711.745.074,-

#### 5.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan. Jumlah aset lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 112.727.275,- dan Rp. 128.460.945,-

##### 5.2.1.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

##### 5.2.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

##### 5.2.1.1.3 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 164.440.000,- dan Rp. 88.500.000,-

##### 5.2.1.1.4 Penyisihan Piutang

Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 88.899.000,- dan Rp. 442.500,-

##### 5.2.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka

Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 7.517.775,- dan Rp. 9.763.083,-

##### 5.2.1.1.6 Persediaan

Persediaan merupakan barang yang habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional, serta barang-barang yang

dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Organisasi.

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 25.669.200,- dan Rp. 30.640.362,- dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kertas dan Cover | 0 | 0 |
| 2 | ATK | 0 | 0 |
| 3 | Perabutan kantor | 2.109.500 | 0 |
| 4 | Alat listrik | 23.559.700 | 30.640.362 |
| | **Jumlah** | **25.669.200** | **30.640.362** |

### 5.2.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan. Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 111.284.085.255,- dan Rp. 84.960.247.113,-

#### 5.2.1.2.1 Tanah

Jumlah Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 12.483.619.314,- dan Rp. 12.037.520.714,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanah | 12.483.619.314 | 12.037.520.714 |
| | **Jumlah** | 12.483.619.314 | **12.037.520.714** |

Mutasi aset tetap tanah disajikan pada tabel per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Nilai (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | **Saldo Awal** | | 12.037.520.714 |
| | | | |
| 2 | **Pertambahan** | | |
| | Pengadaan Belanja Modal Tanah | | |
| | Temuan Aset yang belum tercatat | | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B | | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C | | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E | | |
| | Hibah | **56.998.600** | |
| | Mutasi dari SKPD lain | **389.100.000** | |
| | **Jumlah Pertambahan** | | **446.098.600** |

| No | Uraian | Nilai (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 3 | **Pengurangan** | | |
| | Penghapusan | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D | **0,00** | |
| | Hibah | **0,00** | |
| | **Jumlah** | **0,00** | 12.483.619.314 |

## 5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 12.961.529.733,- dan Rp. 12.072.164.233,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Alat-alat Besar | 523.413.483 | 523.413.483 |
| 2 | Alat-alat Angkutan | 5.496.175.050 | 5.183.875.050 |
| 3 | Alat Bengkel dan Alat Ukur | 2.820.337.750 | 2.820.337.750 |
| 4 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | 815.816.300 | 610.394.800 |
| 5 | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 467.682.000 | 482.592.500 |
| 6 | Alat Laboratorium | 212.180.900 | 212.180.900 |
| 7 | Alat Persenjataan | 0 | 17.418.750 |
| 8 | Komputer | 574.687.500 | 381.433.000 |
| 9 | Rambu-rambu | 2.051.236.750 | 1.840.518.000 |
| | | | |
| | **Jumlah** | **12.961.529.733** | **12.072.164.233** |

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 bertambah dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | Nilai (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | **Saldo Awal** | | **12.072.164.233** |
| | | | |
| 2 | **Pertambahan** | | |
| | Pengadaan Belanja Modal Tahun 2022 | 973.360.000 | |
| | Mutasi Barang Milik Daerah | **0,00** | |
| | Hibah | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D | **0,00** | |

| No | Uraian | Nilai (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| | Aset Yang Belum Tercatat | **0,00** | |
| | Koreksi Temuan Tindak Lanjut | **0,00** | |
| | **Jumlah Pertambahan** | | 973.360.000 |
| 3 | **Pengurangan** | | |
| | Penghapusan | **83.994.500** | |
| | Mutasi Barang Milik Daerah | **0,00** | |
| | Hibah | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset Tidak Berwujud | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset Lain-lain | **0,00** | |
| | Pindah ke Extra Kompatabel | **,00** | |
| | Koreksi Aset | **0,00** | |
| | **Jumlah Pengurangan** | | **83.994.500** |
| 4 | **Saldo Akhir** | | **12.961.529.733** |

### 5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 93.226.014.608,- dan Rp. 70.346.519.508,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 0 | 70.246.519.508 |
| 2 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 0 | 100.000.000 |
| 3. | Bangunan Gedung | 93.226.014.608 | |
| | **Jumlah** | 93.226.014.608 | **70.346.519.508** |

Mutasi Aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut :

| No | Uraian | Nilai (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | **Saldo Awal** | | **70.346.519.508** |
| 2 | **Pertambahan** | | |
| | Pengadaan Belanja Modal Tahun 2023 | **1.877.536.000** | |
| | Hibah | **20.067.811.600** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F | **0,00** | |

| No | Uraian | Nilai (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| | Reklas Barjas | **762.797.500** | |
| | Aset Yang Belum Tercatat | **0,00** | |
| | Mutasi antar SKPD | **171.350.000** | |
| | **Jumlah Pertambahan** | | **22.879.495.100** |
| 3 | **Pengurangan** | | |
| | Penghapusan | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB A | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB D | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F | **0,00** | |
| | Pindah Ruang ke Extrakompatabel | **0,00** | |
| | Koreksi Aset | **0,00** | |
| | **Jumlah Pengurangan** | | **0,00** |
| 4 | **Saldo Akhir** | | **93.226.014.608** |

### 5.2.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 19.546.022.856,- dan Rp. 15.022.876.208,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Instalasi Air Minum/Air Bersih | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 2 | Instalasi Pembangkit Listrik | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 3 | Jaringan Telepon | 24.640.000 | 24.640.000 |
| 4 | Jaringan Listrik | 19.514.882.856 | 14.991.736.208 |
| 5 | Jalan | 0,00 | 0,00 |
| | **Jumlah** | **19.546.022.856** | **15.022.876.208** |

Mutasi Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut :

| No | SOPD | Nilai (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | **Saldo Awal** | | **15.022.876.208** |
| 2 | **Pertambahan** | | |
| | Pengadaan Belanja Modal Tahun 2022 | **3.273.826.200** | |
| | Hibah | **0,00** | |
| | Reklas Barjas | **1.249.320.448** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F | **0,00** | |
| | Aset Yang Belum Tercatat | **0,00** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Jumlah Pertambahan** | | **4.523.146.648** |
| 3 | **Pengurangan** | | |
| | Penghapusan | **0,00** | |
| | Mutasi Barang Milik Daerah | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset Tidak Berwujud | **0,00** | |
| | Koreksi Saldo Awal | **0,00** | |
| | **Jumlah Pengurangan** | | **0,00** |
| 4 | **Saldo Akhir** | | **19.546.022.856** |

### 5.2.1.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jumlah Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 965.816.200 dan Rp. 745.500.000,- rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah | 745.500.000 | 745.500.000 |
| 2 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan | 220.316.200 | **0,00** |
| | | | |
| | | | |
| | **Jumlah** | **965.816.200** | **745.500.000** |

Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut :

| No | Uraian | Nilai (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | **Saldo Awal** | | **745.500.000** |
| 2 | **Pertambahan** | | |
| | Reklas / pindah Ruang pencatatan KIB C | **0,00** | |
| | Pengadaan | **220.316.200** | |
| | Reklas / pindah Ruang pencatatan KIB D | **0,00** | |
| | Utang pengadaan Aset Tetap | **0,00** | |
| | **Jumlah Pertambahan** | | **220.316.200** |
| 3 | **Pengurangan** | | |
| | Reklas / pindah Ruang pencatatan KIB C | **0,00** | |
| | Reklas / pindah Ruang pencatatan KIB D | **0,00** | |
| | | | |
| | **Jumlah Pengurangan** | | **0,00** |
| 4 | **Saldo Akhir** | | **965.816.200** |

### 5.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Kapuas dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 27.898.917.456,- dan Rp. 25.264.333.550,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Peralatan dan Mesin | 11.186.824.919 | 10.702.860.972 |
| 2 | Gedung dan Bangunan | 13.836.140.856 | 12.078.220.532 |
| 3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2.875.951.681 | 2.483.252.046 |
| | **Jumlah** | 27.898.917.456 | **25.264.333.550** |

Saldo Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 berasal dari penambahan dan pengurangan penyusutan di tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

| No | Uraian | Nilai (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | **Saldo Awal** | | **25.264.333.550** |
| | Penyusutan Peralatan dan Mesin | 10.702.860.972 | |
| | Penyusutan Gedung dan bangunan | 12.078.220.532 | |
| | Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 2.483.252.046 | |
| 2 | **Pertambahan** | | |
| | Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin | 567.958.447 | |
| | Penyusutan Mutasi Barang Milik Daerah Antar SKPD | 0 | |
| | Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan | 1.663.392.241 | |
| | Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi | 392.699.635 | |
| | Penyusutan Mutasi Barang Milik Daerah Antar SKPD | 94.528.083 | |
| | Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud | | |
| | Beban Penyusutan Aset Lain-lain | | |
| | Reklas pindah ruang | | |
| | **Jumlah Pertambahan** | | **2.718.578.406** |
| 3 | **Pengurangan** | | |
| | Penghapusan Peralatan dan Mesin | 83.994.500 | |
| | Mutasi Barang Milik Daerah Peralatan dan Mesin | | |
| | Mutasi Barang Milik Daerah Jalan, Jaringan dan Irigasi | | |
| | Penghapusan karena Hibah | | |
| | Reklas Pindah Ruang | | |
| | **Jumlah Pengurangan** | | 83.994.500 |
| 4 | **Saldo Akhir** | | 27.898.917.456 |

### 5.2.1.3 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari Tagihan Jangka Panjang, Aset Tidak Berwujud, dan Aset lain-lain. Jumlah aset lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 591.752.816,- dan Rp. 623.037.016,-

### 5.2.1.3.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pembebanan. Jumlah Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

### 5.2.1.3.2 Aset Tidak Berwujud

Jumlah Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 1.742.540.500,- dan Rp. 1.742.540.500,-

| No | SOPD | Nilai (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | **Saldo Awal** | | 1.742.540.500 |
| 2 | **Pertambahan** | | |
| | Pengadaan Tahun 2023 | **0,00** | |
| | Hibah | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F | **0,00** | |
| | Aset Yang Belum Tercatat | **0,00** | |
| | **Jumlah Pertambahan** | | **0,00** |
| 3 | **Pengurangan** | | |
| | Penghapusan | **0,00** | |
| | Mutasi Barang Milik Daerah | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset Tidak Berwujud | **0,00** | |
| | Koreksi Saldo Awal | **0,00** | |
| | **Jumlah Pengurangan** | | **0,00** |
| 4 | **Saldo Akhir** | | 1.742.540.500 |

### 5.2.1.3.3 Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset yang rusak berat, jumlah aset lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 887.962.000,- dan Rp. 908.045.500,- Aset lain-lain (aset rusak berat) per 31 Desember 2022 dan 2021.

| No | SOPD | Nilai (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | **Saldo Awal** | | **908.045.500** |
| 2 | **Pertambahan** | | |
| | Pengadaan Tahun 2022 | 0,00 | |
| | Hibah | 0,00 | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B | 0,00 | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB C | 0,00 | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB E | 0,00 | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F | 0,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Aset Yang Belum Tercatat | 0,00 | |
| | **Jumlah Pertambahan** | | **0,00** |
| 3 | **Pengurangan** | | |
| | Penghapusan | **20.083.500** | |
| | Mutasi Barang Milik Daerah | 0,00 | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB B | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset KIB F | **0,00** | |
| | Reklas / Pindah Ruang Aset Tidak Berwujud | **0,00** | |
| | Koreksi Saldo Awal | **0,00** | |
| | **Jumlah Pengurangan** | | **20.083.500** |
| 4 | **Saldo Akhir** | | **887.962.000** |

### 5.2.2 Kewajiban

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 275.223.371,- dan Rp. 267.543.378,-

### 5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Beban Yang Masih Harus Dibayar, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 275.223.371,- dan Rp. 267.543.378,-

#### 5.2.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

#### 5.2.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 bersumber dari wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu sewa rumah dinas.

#### 5.2.2.1.3 Utang Belanja

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 275.223.371,- dan Rp. 267.543.378,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | URAIAN | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Utang Beban Pegawai | 0 | 83.041.366 |
| 2 | Utang Beban Barang dan Jasa | **275.223.371** | 184.502.012 |
| | **Jumlah** | **275.223.371** | **267.543.378** |

#### 5.2.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,00,- dan Rp. 0,00

### 5.2.3 Ekuitas

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 111.711.232.990,- dan Rp. 85.444.201.696,-

## 5.3 PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

### 5.3.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO.

Realisasi Pendapatan - LO untuk Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 20.973.003.200,- dan Rp. 54.825.899.171.-

#### 5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah**-**LO terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah - LO, Pendapatan Retribusi Daerah**-**LO, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**-**LO. Realisasi Pendapatan Asli Daerah**-**LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 848.193.000,- dan Rp. 879.373.100,-

##### 5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**-**LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00

##### 5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 843.013.900,- dan Rp. 879.373.100,-

##### 5.3.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pendapatan di luar pendapatan pajak dan retribusi. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**-**LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 5.179.100,- dan Rp. 0,00,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LO | 0 | 0 |
| 2 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO | 0 | 0 |
| 3 | Pendapatan dari Pengembalian -LO | **5.179.100** | 0 |
| | **Jumlah** | **0** | **0** |

##### 5.3.1.1.5 Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pendapatan di luar pendapatan pajak dan retribusi. Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah**-**LO untuk

periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 20.124.810.200,- dan Rp. 53.946.526.071,- dengan rincian sebagai berikut :

### 5.3.2 Beban

Beban merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Beban terdiri dari Beban Operasional dan Beban Transfer. Jumlah Beban untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 13.255.420.334,30,- dan Rp. 17.165.857.440,-

### 5.3.2.1 Beban Operasional

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi dan Beban Penyisihan Piutang.

Jumlah Beban Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 10.600.085.811,30,- dan Rp. 9.950.285.107,-

### 5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 3.801.624.373,- dan Rp. 3.854.822.087,- sebagai berikut :

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Beban Gaji dan Tunjangan - LO | 2.857.378.644 | 2.923.128.328 |
| 2 | Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO | 870.486.004 | 884.447.991 |
| 3 | Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO | 67.283.490 | 39.960.041 |
| 4 | Beban Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 6.476.235 | 7.285.727 |
| | **Jumlah** | **3.801.624.373** | **3.854.822.087** |

### 5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 6.710.004.238,30,- dan Rp. Rp. 5.521.936.520,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Beban Persediaan Bahan/ Material | | 569.709.638 |
| 2 | Beban Jasa Kantor | | 2.056.518.781 |
| 3 | Beban Jasa Kalibrasi | | 8.000.000 |
| 4 | Beban Cetak dan Penggandaan | | |
| 5 | Beban Iuran Jaminan/Asuransi | | 70.992.126 |
| 6 | Beban Makanan dan Minuman | | 22.335.000 |

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 7 | Beban Pakaian Dinas dan Atributnya | | 101.732.550 |
| 8 | Beban Perjalanan Dinas | 1.702.937.144 | 1.221.512.538 |
| 9 | Beban Pemeliharaan | 482.767.000 | 493.835.770 |
| 10 | Beban Honorarium Non PNS – LO | | 937.800.000 |
| 11 | Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan | | 10.619.117 |
| 12 | Beban Lembur | | 12.981.000 |
| 13 | Beban Jasa Konsultasi Perencanaan/Pengawasan | | 15.900.000 |
| 14. | Beban Barang | 1.145.008.562,30 | 0 |
| 15 | Beban jasa | 3.379.291.532 | 0 |
| | **Jumlah** | **6.710.004.238,30** | **5.521.936.520** |

### 5.3.2.1.3 Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 573.084.000,-

### 5.3.2.1.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 2.655.334.523,- dan Rp. 7.215.572.333,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 567.958.447 | 834.385.118 |
| 2 | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 1.663.392.241 | 5.986.270.120 |
| 3 | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 392.699.635 | 369.552.895 |
| 4 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya | 31.284.200 | 25.364.200 |
| | **Jumlah** | **2.655.334.523** | **7.215.572.333** |

### 5.3.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyisihan Piutang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 88.457.200,- dan Rp. 442.500,- dengan rincian sebagai berikut :

| No | Uraian | 2023 (Rp) | 2022 (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Beban Penyisihan Piutang Pajak | 0 | 0 |
| 2 | Beban Penyisihan Piutang Retribusi daerah | 88.457.200 | 442.500 |
| 3 | Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 0 | 0 |
| 4 | Beban Penyisihan Piutang Hibah | 0 | 0 |
| | **Jumlah** | 88.457.200 | **442.500** |

## 5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### 5.4.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 terdiri dari koreksi nilai persediaan senilai Rp. 0,00 dan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 0,00

# BAB VI
# PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

Visi yang diemban Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas yakni ***"*TERWUJUDNYA PELAYANAN PERHUBUNGAN YANG HANDAL, BERDAYA SAING, INFORMATIF DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN KAPUAS*."*** Sebagai penjabaran dari visi yang sudah dirumuskan, maka disusun rencana tindak (action plan) yang menjadi misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas, Misi yang ingin dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan kompetensi dan motivasi kerja Aparatur Perhubungan.
2. Restrukturisasi kualitas angkutan pedesaan dan angkutan perkotaan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta lingkungan hidup dan keselamatan lalu lintas termasuk melakukan reformasi dan sistem manajemen transportasi.
3. Meningkatkan asesibilitas pelayanan intermoda dan antara moda angkutan, serta meningkatkan manajemen pelayanan pembinaan disiplin berlalu lintas serta kejelasan informasi lalu lintas agar dapat berperan dalam kelancaran angkutan dan lalu lintas.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perhubungan yang handal dan memadai sesuai dengan prioritas yang diperlukan.
5. Percepatan pembangunan sarana dan fasilitas pelabuhan.

.

**Tugas dan Fungsi**

1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah kabupaten
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
   - Perumusan kebijakan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
   - Pelaksanaan kegiatan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
   - Pelaksanaan evaluasidan pelaporan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
   - Pelaksanaan urusan administrasi Dinas Perhubungan.
   - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS

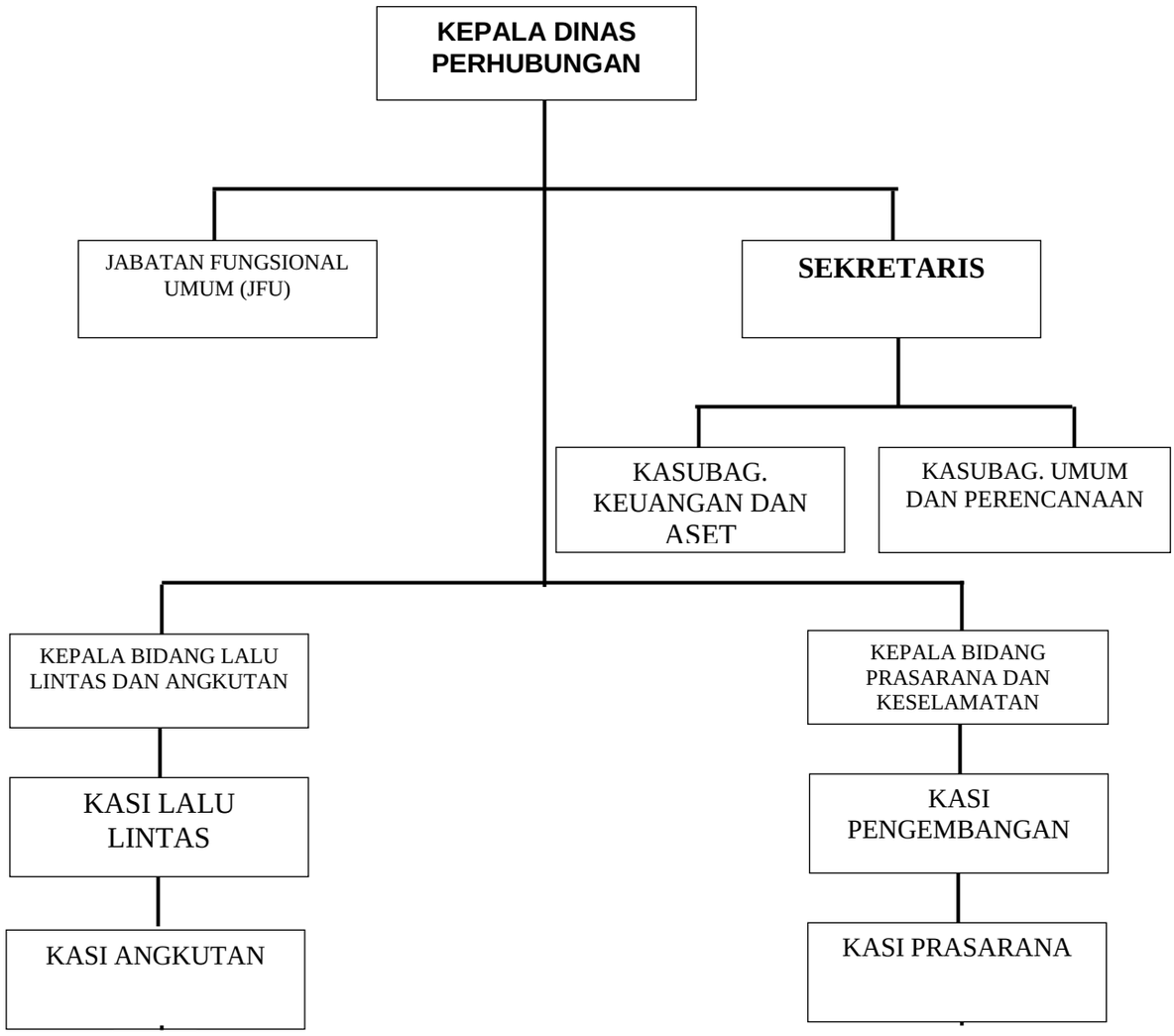

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas menetapkan program/kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2023 meliputi :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
   - ***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***
     - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
     - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***
     - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
     - Penyedia administrasi Pelakasanaan Tugas ASN
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
     - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
   - ***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***
     - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
     - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
     - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
   - ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***
     - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi
   - ***Administrasi Umum Perangkat Daerah***
     - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
     - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
     - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
     - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasioanal atau lapangan
     - Pengadaan Mebel
     - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
     - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
   - ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitas Tanah

**2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

- ***Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota***
  - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana jalan

- ***Pengelola Terminal Penumpang Tipe C***
  - *Rehabilitasi dan pemeliharaanTerminal (Fasilitas utama dan pendukung)*

- ***Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir***
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

- ***Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor***
  - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- ***Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota***
  - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
  - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

- ***Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***

- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- ***Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***
  - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**3. Program peningkatan Pengelolaan Pelayaran**

- **Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**
  - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terdekat pada jaringan Jalan Kabupate/Kota dan/atau Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- ***Penetapan lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian u tuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota***
  - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- ***Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau***
  - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perijinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
  - Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau
  - Pengawasan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
  - Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau

**Catatan Penting lainnya :**

1. Sejak Tahun 2017 nama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berubah menjadi Dinas Perhubungan.
2. Laporan keuangan menggunakan aplikasi SIPD
3. Aset menggunakan aplikasi BMD
4. Rekening Bank Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas :
   a. Rekening Bank Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas adalah ***Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kapuas*** dengan nomor rekening 6000102002014 (An. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas)

b. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kuala Kapuas meneruskan langsung ke rekening ASN untuk Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas.

5. Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas mempunyai Nomor NPWP Atas Nama Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Nomor : 00.136.974.3.711.000

# BAB VII
# PENUTUP

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standari Akuntansi Pemerintahan;
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas;
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas dan sekaligus sebagai bahan untuk dikompilasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas tahun 2023 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas

**VITRIANSON, S.Sos, MA**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691212 199012 1 001